

Implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Indonesia: narrative review

Sutari^{1*}, Haerawati Idris², Misnaniarti²

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya

² Dosen Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya

*Email korespondensi: 10012682125007@student.unsri.ac.id

Accepted: 25 Mei 2022; revision: 28 Mei 2022; published: 30 Juni 2022

Abstrak

Latar Belakang: Saat ini pandemi covid-19 masih terjadi yang mengakibatkan kasus kematian meningkat. Jumlah kasus covid-19 di Indonesia melebihi 2,5 juta dan jumlah kematian mencapai 25.000. Untuk mencegah penularan covid-19, pemerintah telah membuat kebijakan dengan program vaksinasi. Berbagai cara dilakukan untuk mensukseskan program vaksinasi namun masih menghadapi berbagai kendala.

Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah narrative review, pencarian artikel menggunakan data base internet dengan kata kunci vaksinasi covid-19 di Indonesia dengan batasan waktu tahun 2020 s/d 2021. Hasil penelusuran didapatkan 10 artikel selanjutnya dianalisis menggunakan *context, input, process dan product* (CIPP) pada implementasi vaksinasi covid-19. Literatur yang dihasilkan disintesis menggunakan metode naratif dengan mengelompokkan data yang diekstraksi serta hasil yang terukur untuk menjawab tujuan penelitian.

Hasil: Hasil penelusuran menunjukkan bahwa adanya kebijakan serta usaha jempot bola dari pemerintah, namun pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Indonesia belum optimal disebabkan faktor; kurangnya partisipasi masyarakat karena keraguan status "halal" vaksin, adanya keraguan keamanan dan keefektifan vaksin dan ketakutan pada efek samping vaksin.

Kesimpulan: pelaksanaan vaksinasi yang belum optimal berdasarkan pelaporan dan kendala di monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan dari tingkat pusat sampai masyarakat baik dalam aspek kebijakan, dukungan sumber daya manusia, penyebaran informasi agar dapat segera dilakukan perbaikan guna mencapai keberhasilan program vaksinasi

Kata kunci: Vaksinasi, covid-19, kebijakan, implementasi

Abstract

Background: Currently the covid-19 pandemic is still happening which has resulted in an increase in the number of deaths. The number of Covid-19 cases in Indonesia has exceeded 2.5 million and the death toll has reached 25,000. To prevent the transmission of Covid-19, the government has made a policy with a vaccination program.

Methods: The research method used is narrative review, searching for articles using an internet database with the keywords COVID-19 vaccination in Indonesia with a time limit of 2020 to 2021. The search results obtained 10 articles which were then analyzed using context, input, process and product (CIPP) on the implementation of the Covid-19 vaccination. The resulting literature was synthesized using a narrative method by grouping the extracted data and the measurable results to answer the research objectives.

Results: The search results show that the government's policies and efforts to pick up the ball are expected to support success in vaccination, but the implementation of covid-19 vaccination in Indonesia is not optimal due to factors; lack of public participation due to doubts about the "halal" status of vaccines, doubts about vaccine safety and effectiveness and fear of vaccine side effects.

Conclusion: the implementation of vaccination is not optimal based on reporting and obstacles in continuous monitoring and evaluation from the central level to the community both in policy

aspects, human resource support, information dissemination so that improvements can be made immediately in order to achieve the success of the vaccination program.

Keywords: COVID-19, vaccination, policy, implementation

PENDAHULUAN

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS CoV-2) menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan berupa infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) (1).

Hingga November 2021, total kasus konfirmasi COVID-19 di dunia adalah 258 juta kasus dengan 5 juta kematian (CFR2,0%) di 204 Negara Terjangkit dan 151 Negara Transmisi Komunitas. Pemerintah Republik Indonesia telah melaporkan 4,2 juta orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan ada 143.766 kematian terkait COVID-19 yang dilaporkan dan 4,1 juta pasien telah sembuh dari penyakit tersebut sehingga telah mengambil tindakan untuk meningkatkan upaya penanggulangan COVID-19 di Indonesia, mengacu pada pedoman sementara WHO tentang novel Coronavirus (2).

Situasi pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai aspek, antara lain pelayanan kesehatan yang terbukti dengan adanya penurunan jumlah pasien, modifikasi pelayanan oleh tenaga kesehatan, perubahan penggunaan sarana dan prasarana rumah sakit, perubahan kualitas pelayanan kesehatan, penambahan beban kerja tenaga kesehatan, strategi manajerial bagi pelayanan kesehatan dan dampak psikologis. Selain itu juga berdampak pada sektor ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan mental, kesehatan reproduksi/kehamilan serta aspek lain yang ada di masyarakat(3–7).

Dalam menghadapi kedaruratan pandemic COVID-19, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang bertujuan mengurangi penyebaran, penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, tercapainya

kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*) serta melindungi masyarakat untuk tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Intervensi vaksinasi harus dilakukan dalam menunjang penerapan protokol kesehatan yang efektif guna memutus rantai penularan COVID-19 (8–10).

Kekebalan suatu kelompok akan terbentuk jika cakupan vaksinasi tinggi dan merata diseluruh wilayah. Dilihat dari sisi ekonomi, upaya dalam pencegahan melalui pemberian vaksinasi, dinilai akan lebih hemat biaya dibandingkan dengan upaya pengobatan (11).

Sejak dimulai 13 Januari 2021 lalu, pelaksanaan vaksinasi ini terus bergulir ke semua provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Pemerintah sudah mengupayakan pemenuhan kebutuhan vaksinasi dengan berbagai pendekatan, baik melalui skema pemerintah ke pemerintah maupun langsung ke produsen vaksin. Percepatan vaksinasi jadi salah satu kunci untuk mengendalikan laju penularan COVID-19 dan menanggulangi pandemic (12).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Secara rinci cakupan dosis 1 mencapai 199 juta atau 95,63%. Cakupan dosis 2 mencapai 164,5 juta (79%), dan cakupan vaksin dosis 3 mencapai 36,8 juta (17,68%). Golongan lanjut usia (Lansia) di atas 60 tahun merupakan prioritas pemerintah untuk divaksinasi. Sebab lansia merupakan kelompok yang paling rentan terpapar dan paling tinggi risiko kematian dan kesakitan akibat COVID-19. Cakupan vaksinasi lansia dosis pertama mencapai 17,5 juta (81,66%), dosis kedua 13,9 juta (64,74%), dan dosis ketiga mencapai 3,7 juta (17,22%) (13).

Penyelenggaraan pelayanan vaksinasi COVID-19, diperlukan suatu proses perencanaan yang komprehensif guna memenuhi target capaian cakupan vaksinasi yang *massive* dan menyeluruh melalui penyusunan perencanaan pelaksanaan vaksinasi, peningkatan akses pada layanan

vaksinasi yang bermutu dan sesuai standar (8,12).

Beberapa hasil penelitian terkait dengan usaha pemerintah mengatasi pandemi telah dilakukan dengan hasil bahwa pelaksanaan pengadaan vaksin dilakukan dengan cara menggunakan penyedia/ pelaku usaha (14). Terdapat penolakan terhadap masyarakat, alasan penolakan tersebut antara lain: tidak yakin keamanan vaksin, keefektifan, efek samping, keyakinan agama dan lainnya (15). Sehingga dilakukan usaha jemput bola dengan cara mendekatkan layanan penyuntikan vaksin COVID-19 ke masyarakat (16). Peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana (17) sampai pada prosedur untuk mendapatkan vaksin mulai dari antrian hingga dapat menerima vaksin (18).

METODE

Penelitian ini merupakan bentuk *literature review* yang berfokus pada penelusuran *context, input, process dan product* (CIPP) pada implementasi vaksinasi COVID-19. Artikel yang dipilih dalam proses penyaringan melalui database Google Scholar, PubMed, dan ResearchGate kemudian diperiksa dengan menemukan variabel di seluruh teks, terutama di bagian hasil menggunakan *context, input, process dan product* (CIPP).

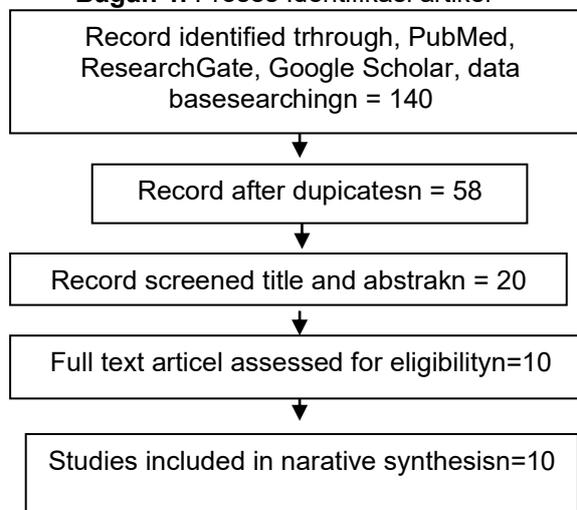
Pencarian artikel dengan menggunakan kata kunci Implementasi vaksinasi COVID-19 di Indonesia dengan kriteria yang ditetapkan peneliti yaitu artikel harus relevan dengan topik, teks lengkap dan berkaitan dengan *context, input, process dan product* (CIPP) pada implementasi vaksinasi COVID-19 dan penelitian yang dilakukan di Indonesia. Rentang tahun publikasi yaitu tahun 2020 s/d 2021. Pencarian artikel menggunakan kata kunci *context, input, process dan product* (CIPP) dan vaksinasi COVID-19. Setiap artikel dikaji terlebih dahulu, kemudian artikel yang relevan di download. Data hasil pencarian mengembalikan 10 artikel yang dianggap relevan, dimana dianggap sama dengan topik.

HASIL

Literatur review ini dilakukan melalui proses peninjauan artikel yang dipilih berdasarkan topik penelitian topik penelitian. Kata kunci yang dimasukkan adalah konteks, input, proses dan produk (CIPP), dan vaksinasi terhadap Covid 19. Penulis menggunakan data berdasarkan *google scholar, pubmed, dan researchgate* untuk mencari artikel. Dari hasil pencarian, penulis mendapatkan 140 artikel, yang selanjutnya diseleksi kesamaan sehingga mendapatkan 58 artikel. Artikel yang ada sebanyak 58 disaring judul dan ringkasan dan mendapatkan 20 artikel. Lalu peneliti melakukan evaluasi kelayakan sehingga didapatkan 10 artikel yang sesuai dengan kriteria penulisan dengan menggunakan metode analisis *context, input, process dan product* (CIPP) terkait implementasi vaksinasi COVID-19 dalam bentuk narasi dengan mengelompokkan data hasil ekstraksi yang mirip dengan hasil yang diukur untuk menjawab tujuan penelitian.

Hasil artikel penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi digabungkan dalam tabel yang meliputi nama dan tahun penelitian, nama jurnal, judul penelitian, desain studi, hasil penelitian yang disajikan di dalam bagan dan tabel.

Bagan 1. Proses Identifikasi artikel



Tabel 1. Hasil Peninjauan literatur

No	Penulis/ Tahun Penelitian	Nama Jurnal	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nurlailah (2021)	Jurnal Dinamika, Vol. 1, No. 2	Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ulu	kepustakaan dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data deskriptif	Ketersediaan SDM dalam melakukan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten OKU masih minim, namun menunjukkan kinerja yang baik. Minimnya peralatan operasional pemerintah (APD, masker, <i>handscoon</i>) menjadi kendala di daerah ini. Insentif yang diberikan kepada 5 individu yang divaksinasi di setiap UPTD Puskesmas karena jumlah 4.444 tim yang divaksinasi di lapangan. Beberapa memiliki lebih dari 5 orang dan 20 anggota tim
2	Fadhilah, etal(2021)	Jurnal Publico, Vol. 4, No. 2	Vaksinasi Covid-19 Puskesmas Mojo (Kota Surabaya	Studi deskriptif	Sumber daya manusia dan sarana prasarana Pelaksanaan pelayanan vaksin COVID-19 di Puskesmas Mojo Kota Surabaya telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)
3	Guring et al, (2021)	Jurnal Kesehatan Vol.10 No.1	Kebijakan Vaksinasi COVID-19 Di Kota Medan tahun 2020	Metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data deskriptif	Pelaksanaan vaksinasi di Dinas Kesehatan Kota Medan sesuai dengan Perpres No. 99 Tahun 2020. Vaksinasi dilakukan dua tahap. Tahap pertama Menerima 20.000 vaksin dan diprioritaskan pada tenaga kesehatan hingga kemasyarakat.
4	Mufidah, etal (2021)	Law Review, Vol. XX, No. 3	Analisis Yuridis Pelaksanaan Pengadaan vaksin Dalam Penanganan Covid-19	Pendekatan deskriptif dengan mereview peraturan perundang- undangan dan	Pelaksanaan proses vaksinasi telah dilaksanakan secara efektif, mengingat tingkat efikasi vaksin Sinovac berada di atas minimal persentase

				pendekatan konseptual	yang diberikan oleh WHO, yaitu 65,3% dari jumlah minimal 50%.
5	Saraswati & Sunarta (2021)	Restorica, Vol.7 No.2	Implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19	Deskriptif kualitatif	Pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Kota Denpasar sudah berjalan dengan efektif dengan menggunakan metode jemput bola untuk menjangkau seluruh masyarakat melalui sinergitas Pemkot, perangkat desa/ kelurahan menggunakan faskes terdekat maupun ke posko-posko vaksinasi yang disediakan sehingga dapat mencakup lebih banyak masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19
6	Niken, et al (2021)	Jurnal Syntax Administration, Vol. 2, No. 11	Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 Di Kota Boyolali	Studi pustaka	Pelaksanaan vaksinasi di Boyolali sudah dapat berjalan dengan baik, dimana sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan pemerintah yaitu vaksinasi dilakukan dalam dua tahapan. Selain itu, prosedur pelayanan vaksinasi juga cukup transparan mulai dari antrian hingga dapat menerima vaksin
7	Mahendra piraveena, et al (2021)	Jurnal kesehatan nasional vol.8 (6)	Tata kelola dan implementasi program vaksinasi yang optimal untuk menahan pandemi COVID-19.	Deskriptif Kualitatif	Pelacakan kontak dan prosedur isolasi, akan tetap menjadi faktor penting dalam mengatasi pandemi COVID-19, efektivitas program vaksinasi dan tingkat penyerapan vaksinasi akan melampaui faktor-faktor ini secara signifikan dalam upaya untuk akhirnya menahan, menghilangkan secara lokal, dan menstabilkan

					pandemi COVID-19 secara global.
8	Isril, et al (2021)	Jurnal Transformative Vol. 7 No. 2 Tahun 2021	Evaluasi vaksin covid-19 untuk lansia di kota Pekanbaru	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, jumlah lansia yang menerima vaksin mengalami penurunan pada stadium II. Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan vaksinasi bagi lansia seperti kondisi tubuh yang tidak dianjurkan dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas vaksin. Ketidakpercayaan masyarakat akan mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan informasi yang jelas mengenai keamanan vaksinasi bagi lansia.
9	Imelda Ritunga, et all (2021)	Jurnal Pengabdian Nusantara, 5(1), 2021,4552	Penguatan Program Vaksinasi Covid-19 Di Wilayah Puskesmas Made Surabaya Barat	Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan vaksinasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan cakupan wilayah kerja puskesmas yang bekerja sama dengan institusi perguruan tinggi yang ada di wilayah kerja Puskesmas tersebut
10	Lia Fitrianingrum (2021)	JPSI (Journal of Public Sector Innovations)	Evaluasi Kebijakan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Deskriptif Kualitatif	Hasil kajian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa barat selain melibatkan unsur organisasi, substansi dan politis maka ada unsur yang sangat penting yang merupakan pendorong kebijakan penanganan covid ini optimal, yaitu dukungan dan partisipasi masyarakat (human society)

PEMBAHASAN

1. *Context*

Pemerintah telah membuat kebijakan terkait secara khusus, yaitu mengenai bagaimana negara merespons dan berupaya mencegah dan menghentikan penyebaran virus jauh lebih luas. Seperti sistem kebijakan lockdown, atau kebijakan menjaga jarak sosial atau social distancing terhadap masyarakat pencegahan penularan COVID-19 (19) serta adanya program vaksinasi COVID-19. Sasaran dalam program vaksinasi COVID-19 adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, masyarakat lanjut usia dan tenaga/ petugas pelayanan publik, masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial dan ekonomi, masyarakat lainnya (11,13,17).

Pelaksanaan vaksin Covid-19 tahap I dilaksanakan mulai bulan Januari 2021, tahap II dimulai pada bulan Februari 2021 dan tahap III dimulai pada bulan Juli 2021 yang didukung dengan penelitian terkait pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan pemberian vaksin sudah tepat sasaran (14,15,18). Hal yang perlu menjadi unsur keberhasilan yaitu faktor penting yang menjadi pendorong kebijakan penanganan covid ini agar optimal adalah adanya dukungan dan partisipasi masyarakat (human society)(20).

2. *Input*

Sumber daya manusia meliputi ketersediaan personil atau tenaga kerja di bidang kesehatan yang bisa mensupport proses pelaksanaan kebijakan. Semua tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi telah mengikuti pembekalan dalam pemberian vaksin COVID-19, untuk memastikan pemberian vaksin COVID-19 dengan aman dan efisien (21). Pemerintah telah melakukan pelatihan kepada petugas kesehatan yang ditunjuk untuk pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 agar memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik dalam pelaksanaan kegiatan tersebut (8,12,15).

Pelaksanaan kegiatan program vaksinasi pendanaannya APBN (Dekonsentrasi, DAK Non Fisik/ BOK), APBD dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu antara lain biaya distribusi vaksin dan logistik ,biaya operasional, biaya pengembangan dan penyebarluasan materi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), biaya penyelenggaraan pertemuan advokasi, koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis serta monitoring dan surveilans KIPI (8,9).

Penelitian yang dilakukan terkait pendanaan bahwa dana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi bersumber dari dana APBN dan APBD. Namun dana tersebut belum sesuai dengan kebutuhan (16). Selanjutnya terkait sumber daya manusia bahwa tenaga yang memberikan pelayanan vaksinasi COVID-19 adalah dokter, bidan, perawat yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan (22). Walaupun ada pula daerah yang tidak memiliki kendala dalam sumberdaya anggaran, karena program pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dibebankan melalui APBN dan APBD (terutama untuk Pelaksanaan Vaksinasi). Dengan kebutuhan anggaran yang relatif besar pemerintah menerapkan beberapa kebijakan diantaranya dengan refocusing dan realokasi APBD dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta adanya dukungan sarana prasarana yang memadai (21).

Sarana prasarana merupakan salah satu penunjang terlaksananya kegiatan vaksinasi COVID-19. Pemerintah telah menyediakan sarana prasarana yang digunakan dalam kegiatan vaksinasi COVID-19 (8) antara lain sumber daya, peralatan, berupa fasilitas fisik, gedung, perlengkapan logistik dan pendukung yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 secara umum sudah memenuhi kebutuhan. Namun untuk perlengkapan operasional di lapangan seperti Alat Pelindung Diri (APD), masker dan handscoon, masih dirasakan sangat kurang. Untuk memenuhi kebutuhan

tersebut, UPTD Puskesmas harus menyediakan secara mandiri agar dapat melaksanakan vaksinasi sesuai dengan standar protokol kesehatan yang berlaku (21,22).

3. Process

Stufflebeam mengemukakan bahwa evaluasi proses merupakan pengecekan yang berkelanjutan atas implementasi perencanaan (23). Penelitian Adellia & Prajawinanti di tahun 2021 menunjukkan bahwa faktor proses terdiri dari proses penyelenggaraan program dan kendala saat pelaksanaan program (24). Faktor proses terdiri dari pelaksanaan kegiatan, pencatatan dan pelaporan(25,26).

Pemerintah Indonesia menetapkan pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana non-alam. Pemerintah juga telah mengeluarkan sebuah regulasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Indonesia melaksanakan vaksinasi COVID-19 dimulai pada tanggal 13 Januari 2021 dengan vaksinasi pertama dilakukan kepada Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo beserta perangkat kementerian dan sejumlah perwakilan dari berbagai latar belakang seperti tenaga kesehatan, pemuka agama, guru, dan lain-lain(27).

Data vaksinasi COVID-19 di Indonesia per tanggal 2021 dari OurWorld in data menyatakan dosis yang telah diberikan kepada masyarakat sebanyak 10,4 juta dengan vaksinasi lengkap sebanyak 3.233.810 dengan persentasi populasi 1,19%. Sedangkan untuk penerima dosis 1 sebanyak 7.179.014 dengan persentase populasi 2,65% (15). Program vaksinasi harus tetap konsisten dilaksanakan sesuai target dengan menjamin ketersediaan vaksin apapun jenisnya (28).

4. Product

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa penelitian menunjukkan hasil bahwa capaian vaksinasi

COVID-19 belum optimal. Data kementerian kesehatan juga menunjukkan bahwa capaian vaksinasi COVID-19 sebesar 55,61%. Banyak faktor yang menyebabkan belum tercapainya vaksinasi COVID-19, penelitian yang dilakukan Gurning dkk pada tahun 2021 faktor tersebut antara lain masyarakat masih meragukan keamanan dari vaksin, masyarakat merasa bahwa vaksinasi COVID-19 masih belum efektif karena setelah mendapatkan vaksin masih juga bisa terkena COVID-19, adanya efek samping setelah pemberian vaksin, dan masyarakat masih belum yakin terhadap kehalalan vaksin COVID-19. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan vaksin COVID-19 dengan menerapkan metode jemput bola dengan mendekatkan layanan penyuntikan vaksin COVID-19 ke masyarakat. Langkah tersebut merupakan upaya meningkatkan cakupan program vaksinasi (15).

Keraguan masyarakat untuk divaksinasi dipengaruhi oleh lingkungan yaitu jika orang-orang terdekatnya menentang dan terus mempengaruhinya, ada kemungkinan mereka juga akan menentang efektivitas vaksin dan kehalalan vaksin. Kewajiban melakukan vaksinasi terhadap warga negara merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia dan dalam perspektif pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan (29). Walaupun faktor karakteristik demografi juga berhubungan dengan keberhasilan pelaksanaan vaksinasi seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan memiliki kerabat dengan riwayat COVID-19 terhadap kesediaan mengikuti program vaksinasi COVID-19 (30).

Pemerintah Kota Pekanbaru melibatkan akademisi dalam menyukseskan pelaksanaan vaksinasi dengan memanfaatkan fasilitas kampus (31,32). Hal tersebut didukung dengan kepercayaan masyarakat serta dukungan tenaga kesehatan terhadap vaksinasi COVID-19 merupakan variabel yang paling dominan berhubungan terhadap program penerimaan

vaksin COVID-19. Serta perlunya dukungan dan optimalisasi dalam penyebaran media informasi yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat pentingnya vaksin COVID-19 (33,34). Memanfaatkan balai pertemuan warga serta melakukan jemput bola guna meningkatkan keberhasilan pelaksanaan vaksinasi (35–37).

Partisipasi masyarakat berperan penting dalam rangka mensukseskan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam program vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 ini bertujuan untuk membentuk imunitas tubuh manusia dalam melawan COVID-19 walaupun sudah mendapatkan vaksinasi protocol kesehatan harus tetap dilakukan.

KESIMPULAN

Pencegahan penyebaran COVID-19 telah dilakukan pemerintah dengan adanya kebijakan program vaksinasi COVID-19. Namun pelaksanaan vaksinasi tersebut belum optimal, yang disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat untuk melakukan vaksin COVID-19 dikarenakan masyarakat masih meragukan keamanan dari vaksin, masyarakat merasa bahwa vaksinasi COVID-19 masih belum efektif karena setelah mendapatkan vaksin masih juga bisa terkena COVID-19, adanya efek samping setelah pemberian vaksin, dan masyarakat masih belum yakin terhadap kehalalan vaksin COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kemenkes Ri. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). 2020;
2. Kemenkes Ri. Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan Ri [Internet]. 2021.
3. Sarasnita N, Raharjo Ud, Rosyad Ys. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Di Indonesia. *J Kesehat*. 2021 Aug 31;12(0):307–15.
4. Rosyad Ys, Wulandari Sr, Istichomah I, Monika R, Febristi A, Sari Dm, Et Al. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental Orang Tua Dan Anak. *J Ilm Kesehat Keperawatan*. 2021;17(1):41–7.
5. Dewi Adc, Nurbaiti M, Surahmat R, Putinah P. Kecemasan Pada Ibu Hamil Di Masa Pandemi Covid 19 Di Rsud Ibnu Sutowo Baturaja. *J Smart Keperawatan*. 2021 Jun 28;8(1):64–9.
6. Hafni R. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan Online. *Semin Nas Teknol Edukasi Sos Dan Hum*. 2021 Jun 28;1(1):601–11.
7. Bahtiar Ra. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Serta Solusinya. 2021;6.
8. Kemenkes Ri. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4638 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 2021;
9. Kemenkes Ri. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Nomor 1 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 2021;
10. Wiryawan Iw. Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia. *Pros Webinar Nas Univ Mahasaraswati Denpasar* 2020. 2020;
11. Permenkes Ri. Pmk No. 18 Th 2021 Ttg Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. 2021;
12. Arina E. Strategi Dan Tantangan Dalam Meningkatkan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Untuk Herd Immunity. *J Med Utama*. 2021 Oct 3;3(01 Oktober):1265–72.
13. Kemenkes Ri. Cakupan Vaksinasi Covid-19 – Sehat Negeriku. 2022.
14. Mufidah L. Analisis Yuridis Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) [A Legal Analysis Of The

- Implementation Of Vaccine Procurement In Managing The Coronavirus Disease 19 (Covid-19)]. *Law Rev.* 2021;270–99.
15. Gurning Fp, Siagian Lk, Wiranti I, Devi S, Atika W. Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Medan Tahun 2020. *J Kesehat.* 2021;10(1):43–50.
 16. Saraswati Kc, Sunarta In. Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Dalam Mengurangi Tingkat Penyebaran Virus Corona Di Kota Denpasar. *Restorica J Ilm Ilmu Adm Negara Dan Ilmu Komun.* 2021;7(2):21–7.
 17. Atika Fp. Analisis Kesiapan Pelaksanaan Program Vaksinasi Covid-19 Di Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2021 [Diploma]. Universitas Andalas; 2021.
 18. Niken N, Mia P, Septiana S, Reyhan R, Argha A, Putra P. Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Boyolali. *J Syntax Admiration.* 2021 Nov 23;2(11):2138–44.
 19. Valerisha A, Putra Ma. Pandemi Global Covid-19 Dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-Digital? *J Ilm Hub Int.* 2020 Apr 27;131–7.
 20. Fitrianingrum L. Evaluasi Kebijakan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat: (Evaluation Of The West Java Provincial Government's Policy On Covid-19). *Jpsi J Public Sect Innov.* 2021 Nov 30;6(1):39–50.
 21. Nurlailah N. Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kab. Ogan Komering Ulu. *J Din.* 2021;1(2):59–68.
 22. Fadhilah Mu, Fauziyah U, Cahyani Aa, Arif L. Evaluasi Pelayanan Vaksin Covid – 19 (Studi Kasus Puskesmas Mojo Kota Surabaya). *J Publicuho.* 2021;4(2):536–52.
 23. Stufflebeam DI, Zhang G. *The Cipp Evaluation Model: How To Evaluate For Improvement And Accountability.* Guilford Publications; 2017. 401 P.
 24. Adellia. Implementasi Model Evaluasi Cipp Pada Pelaksanaan Program Kelompok Belajar Tbm Leshutama Era Pandemi Covid-19 [Internet].
 25. Isril I, Ms Zh, Rizaldi A. Evaluation Of The Covid 19 Vaccine Policy For The Elderly Community In Pekanbaru City. *J Transform.* 2021;7(2):226–40.
 26. Risdanti S, Arso Sp, Fatmasari Ey. Evaluasi Context, Input, Process, And Product (Cipp) Deteksi Dini Gangguan Jiwa Di Puskesmas Banyuurip. *Link.* 2021 May 27;17(1):22–8.
 27. Covid-19 Wrp. Percepat Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Agar Kekebalan Kelompok Segera Tercapai - Masyarakat Umum. *Covid19.Go.Id.* 2020.
 28. Joyosemito Is, Nasir Nm. Gelombang Kedua Pandemi Menuju Endemi Covid-19: Analisis Kebijakan Vaksinasi Dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Indonesia. *J Sains Teknol Dalam Pemberdaya Masy* [Internet]. 2021;2(1).
 29. Ginting Oa, Lubis My, Affan I. Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hak Konstitusional Warga Negara. *J Ilm Metadata.* 2021 Sep 14;3(2):508–24.
 30. Irvine L, Veronika D, Kurnia Ma. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Protokol Kesehatan Dan Kesiapan Mengikuti Vaksinasi Covid-19 Di Kota Medan. *Ris Inf Kesehat.* 2021;10(2):98–106.
 31. Putra Id, Deswinda D, Hendra D, Kharisna D. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Dalam Percepatan Herd Immunity Di Stikes Payung Negeri Pekanbaru. *J Pengabdian Kesehat.* 2022 Jan 28;5(1):20–6.
 32. Ritunga I, Lestari Sh, Santoso JI, Effendy Lv, Siahaan Scpt, Lindarto Ww, Et Al. Penguatan Program Vaksinasi Covid-19 Di Wilayah Puskesmas Made Surabaya Barat. *J Abdinus J Pengabdian Nusant.* 2021 Jun 22;5(1):45–52.
 33. Lasmita Y, Misnaniarti M, Idris H. Analisis Penerimaan Program Vaksinasi Covid-19 Pada Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Alang-

- Alang Lebar [magister]. Sriwijaya University; 2021.
34. Rizky TI, Liana Y, Nurbaiti M, Surahmat R, Akhriansyah M. Peningkatan Pengetahuan Siswa Melalui Edukasi tentang Pencegahan Covid-19. *Empower J Pengabd Masy*. 2022;1(1):81–6.
35. Dwinarko, Sulistyanto A. Sosialisasi Manfaat Vaksinasi dan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Pandemi Covid-19 di Desa Ponggang, Kecamatan Serangpanjang, Subang. *URGensi J Pengabd Masy Multidisiplin*. 2021;1(1).
36. Malihah M, Sukaesih S, Rukmana EN, Samson S. Kabaca Jemput Bola : Inovasi Layanan TBM Kampung Buku Cibubur pada Masa Pandemi. *TADWIN J Ilmu Perpust Dan Inf*. 2020 Dec 31;1(2):105–19.
37. Rachmadi T, Rahayu TP, Waluyo A, Yuliyanto W. Pemberian Vaksinasi COVID-19 Bagi Masyarakat Kelompok Petugas Pelayanan Publik di Kecamatan Buluspesantren. *JURPIKAT J Pengabd Kpd Masy*. 2021 Aug 31;2(2):318–33.